

Manajemen Kekeringan Berbasis Desa: Strategi Pemerintah Desa Aska dalam Siklus Penanggulangan Bencana

Abd Wahid^{1✉}, Ahrah Mardiah² Hasdinawati

(1,2,3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Sinjai, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini menganalisis strategi Pemerintah Desa Aska dalam menghadapi kekeringan berdasarkan siklus penanggulangan bencana. Kajian dilatarbelakangi fenomena El-Nino 2023 yang memicu krisis air bersih, gangguan pertanian, dan tekanan ekonomi rumah tangga. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fase prabencana dilakukan melalui penyediaan PAMSIMAS, SPAM, sumur embung, dan sosialisasi peringatan dini. Pada fase tanggap darurat, pemerintah desa mencari sumber air dan menyediakan pompa untuk membantu suplai air. Pada fase pascabencana, pemerintah desa menyalurkan bantuan pangan serta merencanakan sumur bor dan penambahan embung. Dampak utama meliputi gagal panen, tanaman mati, sumber air mengering, biaya pembelian air meningkat, tanah retak, dan ternak kekurangan pakan. Strategi didukung kemandirian masyarakat, tetapi terhambat miskomunikasi, keterbatasan anggaran, dan fasilitas air yang belum optimal.

Abstract: This study analyzes the strategy of the Aska Village Government in responding to drought using the disaster management cycle. The study was motivated by the 2023 El-Nino phenomenon, which triggered clean water scarcity, agricultural disruption, and household economic pressure. A descriptive qualitative approach was applied through observation, interviews, and documentation. The findings show that pre-disaster efforts included PAMSIMAS, SPAM, retention wells, and early warning dissemination. During emergency response, the village government identified water sources and provided pumps. In the post-disaster phase, it distributed food assistance and planned bore wells and additional retention wells. The main impacts were crop failure, plant mortality, drying water sources, increased water costs, cracked soil, and livestock feed shortages. Community self-reliance supported the strategy, while miscommunication, limited funding, and underperforming water facilities constrained it.

Article history:

Received: 02 April 2026

Revised: 18 April 2026

Accepted: 15 May 2026

Published: 30 May 2026

Kata Kunci:

Strategi pemerintah desa, kekeringan, mitigasi bencana, siklus penanggulangan bencana, krisis air bersih

Keyword:

village government strategy, drought, disaster mitigation, disaster management cycle, clean water crisis

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



How to cite: Wahid, A., Mardiah, A., & Hasdinawati (2026). Manajemen Kekeringan Berbasis Desa: Strategi Pemerintah Desa Aska dalam Siklus Penanggulangan Bencana. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(2), 221–238. <https://doi.org/10.70716/perseptif.v4i2.552>

PENDAHULUAN

Kekeringan merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang sering berlangsung perlahan, tetapi dampaknya dapat menjalar ke banyak sektor kehidupan masyarakat. Berbeda dengan banjir atau tanah longsor yang tampak sebagai kejadian cepat, kekeringan umumnya diawali oleh menurunnya curah hujan, berkurangnya cadangan air tanah, menyusutnya sumber air permukaan, dan meningkatnya tekanan terhadap kebutuhan rumah tangga, pertanian, serta peternakan. Dalam konteks pemerintahan lokal, kekeringan tidak hanya dipahami sebagai gejala alam, melainkan juga sebagai persoalan tata kelola karena menuntut kemampuan pemerintah untuk membaca risiko, menyiapkan fasilitas, mengoordinasikan masyarakat, dan memulihkan dampak sosial-ekonomi setelah bencana terjadi. Neritarani (2019) menegaskan bahwa bencana dapat mengganggu pola hidup manusia dan menimbulkan kerusakan lingkungan, harta benda, serta korban jiwa; sementara Hamid et al. (2021)

menunjukkan bahwa kekeringan memiliki dampak nonstruktural yang dapat meluas hingga pada ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

Fenomena El-Nino pada tahun 2023 memperkuat urgensi kajian ini. Musim kemarau yang lebih panjang membuat banyak wilayah menghadapi krisis air bersih, termasuk Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dalam naskah skripsi yang menjadi dasar artikel ini, Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan diidentifikasi sebagai salah satu desa yang mengalami kekeringan, terutama karena sumber air menyusut, sumur rumah tangga mengering, area persawahan kekurangan air, dan beberapa fasilitas penyedia air belum berfungsi maksimal. Kondisi tersebut memberi tekanan langsung pada masyarakat yang mayoritas hidup dari sektor pertanian. Ketika air tidak tersedia secara memadai, keluarga petani tidak hanya kehilangan hasil panen, tetapi juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air, menjaga tanaman, serta memenuhi kebutuhan ternak.

Kekeringan di Desa Aska menjadi penting dianalisis karena desa tersebut telah memiliki beberapa fasilitas penyedia air, seperti PAMSIMAS, SPAM, sumur embung, dan sumur galian masyarakat. Secara ideal, keberadaan fasilitas tersebut dapat menjadi modal awal mitigasi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian fasilitas tidak berfungsi sebagaimana mestinya, antara lain karena hilangnya mesin pompa, lemahnya pengelolaan, sumber air yang tidak stabil, serta keterbatasan koordinasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Situasi ini menunjukkan bahwa infrastruktur saja tidak cukup; kapasitas pengelolaan, komunikasi publik, pemantauan, dan keberlanjutan kelembagaan menjadi faktor yang sama pentingnya.

Pemerintah desa menempati posisi strategis dalam penanggulangan bencana karena merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Haryo, Praseno & Mahendra, (2021) menyebut pemerintah wajib berperan aktif dalam penanggulangan kekeringan karena memiliki tanggung jawab memastikan kesejahteraan dan membantu penyelesaian persoalan yang menyangkut kehidupan masyarakat luas. Pada tingkat desa, peran tersebut tampak dalam upaya penyediaan sarana air, penyampaian peringatan dini, koordinasi dengan pemerintah daerah, penyaluran bantuan, dan fasilitasi solusi bersama. Peran ini sejalan dengan gagasan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menempatkan warga bukan hanya sebagai penerima layanan, tetapi juga mitra aktif dalam pembangunan dan pemecahan masalah (Affan, 2020).

Kajian terdahulu tentang kekeringan telah banyak menyoroti aspek mitigasi, prediksi, dan penyediaan sumber air. Irawan (2022), misalnya, menekankan pentingnya prediksi curah hujan sebagai dasar mitigasi kekeringan. Latif et al. (2020) memperlihatkan pemanfaatan geolistrik untuk menemukan potensi air tanah sebagai solusi teknis. Fatah et al. (2023) menyoroti peran lembaga swadaya masyarakat dalam pendampingan warga di wilayah rawan kekeringan, sedangkan Wiharja (2023) membahas suplai air bersih dan sosialisasi sebagai bagian dari upaya BPBD dalam mitigasi kekeringan. Penelitian-penelitian tersebut memberi kontribusi penting, tetapi belum secara khusus menjelaskan bagaimana pemerintah desa merancang strategi berbasis siklus penanggulangan bencana sambil membaca dampak sosial, pertanian, ekonomi, dan kelembagaan pada satu lokasi desa tertentu.

Kebaruan artikel ini terletak pada penempatan pemerintah desa sebagai aktor utama penanggulangan kekeringan berbasis siklus bencana. Siklus tersebut mencakup fase sebelum bencana, saat bencana, dan pascabencana sebagaimana dirumuskan Sutrisnawati (2018). Kerangka ini memungkinkan analisis strategi dilakukan secara berurutan: bagaimana kesiapsiagaan dibangun sebelum kekeringan, apa yang dilakukan saat krisis air berlangsung, dan bagaimana pemulihan dilakukan setelah dampak muncul. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menggambarkan daftar

kegiatan pemerintah desa, tetapi juga menilai kesinambungan strategi antarfase serta hambatan yang menyebabkan sebagian upaya belum optimal.

Artikel ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana strategi Pemerintah Desa Aska dalam menghadapi bencana alam kekeringan. Kedua, dampak apa saja yang dirasakan masyarakat akibat kekeringan. Ketiga, faktor apa saja yang menghambat dan mendukung strategi pemerintah desa dalam mengatasi kekeringan. Jawaban atas ketiga pertanyaan tersebut diharapkan memberi kontribusi praktis bagi pemerintah desa dalam menyusun program penanganan kekeringan yang lebih sistematis, sekaligus memberikan kontribusi akademik bagi kajian ilmu pemerintahan, manajemen bencana, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Secara konseptual, strategi dipahami sebagai rangkaian aktivitas penting yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu (Zakiyah & Idrus, 2017). Dalam penanggulangan bencana, strategi tidak berhenti pada tindakan darurat, tetapi meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Oleh karena itu, keberhasilan pemerintah desa tidak hanya dilihat dari kemampuan menyediakan bantuan air ketika kekeringan terjadi, melainkan juga dari kemampuannya membangun sistem peringatan dini, memelihara fasilitas, melibatkan masyarakat, mengintegrasikan kebutuhan air ke dalam dokumen perencanaan desa, dan mendorong solusi jangka panjang yang sesuai kondisi lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena persoalan strategi pemerintah desa dalam menghadapi kekeringan tidak cukup dijelaskan melalui angka, tetapi memerlukan pemahaman mendalam terhadap pengalaman masyarakat, proses pengambilan keputusan, pola koordinasi, dan konteks sosial tempat kebijakan desa dilaksanakan. Raco (2010) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami gejala sentral; dalam artikel ini, gejala sentral tersebut adalah kekeringan dan respons pemerintah desa terhadapnya.

Lokasi penelitian adalah Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Aska dipilih karena mengalami kekeringan pada tahun 2023 dan memiliki karakteristik wilayah agraris dengan kebutuhan air yang tinggi untuk rumah tangga, pertanian, dan peternakan. Desa ini terdiri atas beberapa dusun dengan kondisi sumber air yang berbeda-beda. Dalam konteks penelitian, perbedaan kondisi antarwilayah dusun penting karena memengaruhi tingkat kerentanan, pilihan strategi masyarakat, serta efektivitas fasilitas penyedia air yang disiapkan pemerintah desa.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan informan yang mengetahui langsung persoalan kekeringan di Desa Aska. Informan mencakup kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, perangkat desa yang berkaitan dengan kesejahteraan, tokoh masyarakat, dan warga terdampak. Pemilihan informan dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengalaman, kewenangan, atau pengetahuan tentang strategi penanggulangan kekeringan. Heryana (2018) menjelaskan bahwa informan dalam penelitian kualitatif dipilih karena kemampuannya menyediakan informasi yang relevan dan mendalam.

Data sekunder diperoleh melalui dokumen desa, profil desa, data penerima bantuan, dokumentasi fasilitas air, dokumentasi wawancara, peraturan terkait pemerintahan desa dan penanggulangan bencana, serta literatur akademik yang relevan. Dokumen tersebut digunakan untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi, sekaligus memastikan bahwa analisis tidak hanya bertumpu pada persepsi satu pihak. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan pernyataan pemerintah desa, pengalaman masyarakat, dan bukti dokumentasi fasilitas atau bantuan yang tersedia.

Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat langsung kondisi fasilitas seperti PAMSIMAS, SPAM, sumur embung, sumur bor, dan sumur galian masyarakat. Wawancara dilakukan untuk menggali strategi yang dirancang pemerintah desa, dampak yang dirasakan masyarakat, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah foto kegiatan, data penerima bantuan pangan, profil desa, dan dokumen perencanaan yang berkaitan dengan penanganan kekeringan.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data hasil wawancara dan dokumentasi diseleksi sesuai fokus penelitian: strategi pemerintah desa, dampak kekeringan, serta faktor penghambat dan pendukung. Pada tahap penyajian, data disusun dalam narasi tematik dan tabel agar hubungan antarfase penanggulangan bencana dapat terlihat. Pada tahap kesimpulan, temuan dibandingkan dengan konsep siklus penanggulangan bencana dan literatur terdahulu untuk memperoleh makna teoretis dan praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Aska merupakan desa agraris dengan ketergantungan tinggi pada ketersediaan air. Berdasarkan profil desa yang digunakan dalam penelitian, Desa Aska memiliki enam dusun, yaitu Hemptengge, Ballakale, Bulusibalie, Kalamisu, Jenna, dan Batusongo. Jumlah kepala keluarga tercatat 1.085 dengan jumlah penduduk 4.131 jiwa. Struktur mata pencaharian menunjukkan bahwa petani menjadi kelompok terbesar, yaitu 1.005 orang dari data pekerjaan yang tersedia. Karakteristik ini menjelaskan mengapa kekeringan tidak hanya berdampak pada kebutuhan air minum, tetapi juga pada ketahanan pangan, pendapatan keluarga, dan keberlanjutan produksi pertanian.

Table 1. Ringkasan karakteristik konteks penelitian di Desa Aska

Aspek	Data pokok	Relevansi terhadap kekeringan
Wilayah	Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai	Menjadi lokus desa agraris yang mengalami kekeringan pada 2023.
Dusun	Hemptengge, Ballakale, Bulusibalie, Kalamisu, Jenna, dan Batusongo	Kerentanan antardusun berbeda sesuai sumber air dan kondisi tanah.
Penduduk	1.085 KK dan 4.131 jiwa	Kebutuhan air rumah tangga tinggi saat musim kemarau.
Mata pencaharian dominan	Petani sebanyak 1.005 orang pada data pekerjaan desa	Kekeringan langsung memengaruhi pendapatan dan ketahanan pangan.
Fasilitas air	PAMSIMAS, SPAM, sumur embung, sumur bor, dan sumur galian	Menjadi modal mitigasi, tetapi sebagian fasilitas belum berfungsi optimal.

Sumber: *Profil Desa Aska Tahun 2023, diolah peneliti (2026)*

Temuan pertama menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Desa Aska telah mencakup tiga fase utama siklus penanggulangan bencana, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya terintegrasi dalam program desa jangka panjang. Pada fase sebelum bencana, pemerintah desa melakukan langkah kesiapsiagaan melalui pengadaan atau pemanfaatan fasilitas air, seperti PAMSIMAS, SPAM, sumur embung, dan rencana sumur bor. Fasilitas tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan air bersih rumah tangga dan mendukung kebutuhan pertanian ketika musim kemarau berlangsung. Selain itu, pemerintah desa menyampaikan peringatan dini melalui kepala dusun dan pengurus masjid setelah memperoleh informasi dari pemerintah kabupaten atau BPBD.

Kesiapsiagaan pemerintah desa tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga nonstruktural. Secara struktural, pemerintah desa mengupayakan fasilitas penyedia air yang dapat digunakan masyarakat. Secara nonstruktural, pemerintah desa melakukan sosialisasi tentang kewaspadaan menghadapi kemarau, penghematan air, antisipasi kebakaran, dan pencarian sumber air alternatif. Bentuk sosialisasi ini penting karena masyarakat membutuhkan informasi praktis, terutama ketika suhu meningkat dan sumber air mulai berkurang. Surmaini (2016) menekankan pentingnya pemantauan dan peringatan dini untuk mengurangi risiko kekeringan pertanian; dalam konteks Desa Aska, peringatan dini diterjemahkan melalui jaringan lokal yang dekat dengan warga, yaitu masjid dan kepala dusun.

Table 2. Strategi Pemerintah Desa Aska berdasarkan siklus penanggulangan bencana

Fase	Bentuk strategi	Catatan analitis
Sebelum bencana	Penyediaan PAMSIMAS, SPAM, sumur embung, rencana sumur bor, sosialisasi peringatan dini melalui masjid dan kepala dusun.	Kesiapsiagaan sudah ada, tetapi belum sepenuhnya berbasis peta risiko dan pemeliharaan berkala.
Saat bencana	Mencari sumber air, menyediakan pompa, membantu suplai air, dan memfasilitasi warga yang jauh dari sumber air.	Respons cepat membantu warga, namun cakupan belum merata karena alat dan sumber air terbatas.
Pasca bencana	Bantuan pangan, rencana penambahan sumur embung, rencana sumur bor, serta pelatihan pengelola fasilitas air.	Pemulihan perlu diarahkan dari bantuan sesaat menuju sistem air desa yang berkelanjutan.

Sumber: Hasil wawancara lapangan, diolah peneliti (2026).

Meskipun demikian, fase prabencana masih memiliki kelemahan. Beberapa fasilitas tidak berfungsi maksimal, misalnya PAMSIMAS dan SPAM yang terkendala mesin pompa, pengelolaan, atau ketersediaan air. Pemerintah desa juga belum sepenuhnya menjadikan penanganan kekeringan sebagai program prioritas yang terukur dalam dokumen perencanaan desa. Akibatnya, strategi lebih banyak muncul sebagai respons terhadap kondisi yang terjadi, bukan sebagai desain manajemen risiko yang disusun berdasarkan peta kerentanan, kebutuhan air setiap dusun, dan skema pemeliharaan fasilitas. Pada fase saat bencana atau tanggap darurat, strategi utama pemerintah desa adalah membantu masyarakat memperoleh air. Pemerintah desa mencari sumber air yang masih dapat dimanfaatkan, menyiapkan mesin pompa, dan membantu suplai air bagi warga yang mengalami kesulitan. Strategi ini memperlihatkan fungsi pemerintah desa sebagai fasilitator, terutama ketika fasilitas formal tidak mampu memenuhi kebutuhan seluruh warga. Dalam beberapa kasus, masyarakat tetap harus membeli air dari daerah lain karena bantuan pompa terbatas dan kebutuhan air tidak seragam antar rumah tangga.

Tanggap darurat yang dilakukan Pemerintah Desa Aska memiliki makna penting karena secara langsung mengurangi tekanan masyarakat pada puncak kekeringan. Namun, efektivitasnya terbatas karena jumlah pompa tidak sebanding dengan kebutuhan, cakupan distribusi belum merata, dan belum tersedia mekanisme pendataan cepat tentang rumah tangga yang paling terdampak. Tindakan tanggap darurat juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki strategi mandiri, seperti membuat sumur galian, menggunakan satu sumur bersama, mengambil air dari sungai, atau membeli air tangki. Kemandirian ini membantu mengurangi beban pemerintah desa, tetapi sekaligus memperlihatkan adanya kesenjangan layanan yang perlu ditutup melalui strategi kelembagaan yang lebih kuat.

Pada fase pascabencana, pemerintah desa melakukan pemulihan melalui penyaluran bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat terdampak, terutama yang mengalami penurunan hasil panen. Data penelitian menunjukkan terdapat 351 KK penerima bantuan pangan di enam dusun. Bantuan ini membantu kebutuhan dasar warga setelah produksi pertanian terganggu. Selain itu, pemerintah desa merencanakan pembuatan sumur bor, penambahan sumur embung, dan pelatihan pengelola fasilitas air agar kerusakan atau disfungsi fasilitas tidak berulang. Fase pemulihan juga mencakup evaluasi terhadap kelembagaan pengelola PAMSIMAS dan SPAM.

Temuan tentang strategi pascabencana memperlihatkan bahwa pemulihan belum sepenuhnya bergerak dari bantuan menuju penguatan sistem. Bantuan pangan penting untuk mengurangi tekanan jangka pendek, tetapi kebutuhan jangka panjang adalah ketersediaan air yang berkelanjutan, pemeliharaan fasilitas, pengelolaan iuran yang transparan, dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk dukungan teknis. Hariyanto et al. (2022) menunjukkan bahwa kelembagaan pengelola air bersih sangat menentukan keberlanjutan layanan; hal ini relevan dengan kondisi Desa Aska, di mana fasilitas fisik tidak akan efektif tanpa kelembagaan pengelola yang kuat.

Jika dibandingkan dengan teori siklus penanggulangan bencana Sutrisnawati (2018), strategi Pemerintah Desa Aska telah mencakup seluruh fase, tetapi belum membentuk satu siklus yang tertutup dan berulang. Fase prabencana belum sepenuhnya berbasis peta risiko dan rencana kontinjensi. Fase tanggap darurat masih bergantung pada improvisasi pencarian air dan bantuan pompa. Fase pascabencana sudah mencakup bantuan dan rencana pembangunan fasilitas, tetapi evaluasi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi perubahan kebijakan desa yang terstruktur. Dengan demikian, tantangan utama bukan ketiadaan strategi, melainkan konsistensi, integrasi, dan keberlanjutan strategi antarwaktu.

Table 3. Data penerima bantuan pangan pascakekeringan di Desa Aska

No	Dusun	Jumlah KK penerima
1	Kalamisu	90
2	Jenna	70
3	Bulusibalie	51
4	Batusongo	33
5	Ballakale	50
6	Hempengnge	57
Jumlah		351

Sumber: Pemerintah Desa Aska, data bantuan pangan tahun 2023, diolah peneliti (2026).

Temuan kedua berkaitan dengan dampak kekeringan yang dirasakan masyarakat. Dampak paling menonjol terjadi pada sektor pertanian. Banyak tanaman mengalami kematian atau penurunan

produktivitas, seperti padi, merica, cengkeh, dan beberapa tanaman perkebunan. Gagal panen terjadi karena suhu panas, kurangnya pasokan air, dan munculnya hama pada masa tanam. Bagi keluarga petani, kegagalan panen bukan hanya berarti kehilangan hasil, tetapi juga kehilangan tenaga, waktu, modal, dan harapan pendapatan tahunan. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Sudarti dan Puspitasari (2021) bahwa krisis ketersediaan air pada musim kemarau dapat mengganggu kebutuhan domestik sekaligus aktivitas produktif masyarakat desa.

Dampak kedua adalah mengeringnya sumber air. Sumur rumah tangga, sungai kecil, dan sumber air permukaan mengalami penyusutan. Masyarakat kemudian mencari sumber air alternatif, berbagi sumur, atau membeli air. Dalam beberapa dusun, satu sumur digunakan bersama oleh beberapa keluarga dengan sejumlah mesin pompa yang berbeda. Praktik ini mencerminkan solidaritas lokal, tetapi juga berisiko menimbulkan konflik jika penggunaan air tidak diatur. Air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan berubah menjadi sumber ketegangan karena jumlah pengguna lebih besar daripada kapasitas sumber air.

Dampak ketiga adalah meningkatnya pengeluaran rumah tangga. Ketika sumur kering, sebagian warga membeli air tangki dengan biaya sekitar Rp85.000 per meter kubik atau sekitar 1.000 liter. Jika pembelian dilakukan berulang selama musim kemarau, beban ekonomi menjadi besar, terutama karena pada saat yang sama hasil pertanian menurun. Beban ganda ini memperlihatkan bahwa kekeringan adalah bencana yang mempertemukan krisis ekologis dan krisis ekonomi. Dalam keluarga petani kecil, pengeluaran tambahan untuk air dapat mengurangi kemampuan membeli kebutuhan pokok lain, membayar pendidikan anak, atau membeli pupuk dan bibit.

Table 4. Dampak kekeringan yang dirasakan masyarakat Desa Aska

Aspek dampak	Bentuk dampak	Implikasi bagi kebijakan desa
Pertanian	Gagal panen, tanaman merica dan cengkeh mengering, produksi padi menurun.	Perlu dukungan irigasi kecil, embung, bibit tahan kering, dan pengaturan musim tanam.
Sumber air	Sumur dan sungai kecil menyusut; warga berbagi sumur atau membeli air.	Perlu peta sumber air, sistem pemeliharaan, dan distribusi air darurat.
Ekonomi rumah tangga	Biaya tambahan pembelian air sekitar Rp85.000 per tangki/1.000 liter.	Perlu bantuan tepat sasaran dan pengurangan biaya akses air.
Tanah	Tanah retak dan sulit menyimpan kelembapan.	Perlu konservasi lahan, penghijauan, dan pengelolaan air hujan.
Peternakan	Ternak kurus, kekurangan pakan, dan risiko pencurian meningkat.	Perlu cadangan pakan dan pengawasan ternak saat musim kemarau.

Sumber: *Data primer penelitian, diolah peneliti (2026).*

Dampak keempat berkaitan dengan kesuburan tanah. Wilayah yang jauh dari sumber air mengalami tanah retak, keras, dan sulit ditanami. Tanaman yang membutuhkan kelembapan tanah tidak mampu tumbuh dengan baik. Sumur embung membantu sebagian lahan pertanian, tetapi belum mampu menjangkau seluruh area. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi penanggulangan kekeringan tidak cukup hanya menyediakan air minum, tetapi juga harus mempertimbangkan tata air pertanian, konservasi lahan, dan perlindungan sumber air. Minhar dan Aco (2021) menekankan bahwa mitigasi

kekeringan perlu memperhatikan hubungan antara kondisi wilayah, kebutuhan air, dan tindakan masyarakat.

Dampak kelima terjadi pada sektor peternakan. Sapi, kambing, dan ternak lain mengalami kesulitan pakan karena rumput mengering. Sebagian sapi menjadi kurus, sementara peternak harus mencari jerami atau memindahkan ternak ke area sawah yang masih menyediakan sisa tanaman. Kondisi ini juga menimbulkan risiko pencurian ternak karena ternak sering dibiarkan di sawah untuk mencari pakan. Dampak peternakan memperlihatkan bahwa kekeringan berpengaruh terhadap rantai kehidupan desa secara menyeluruh: air berkurang, rumput mengering, ternak melemah, biaya meningkat, dan keamanan lingkungan ikut terganggu.

Dampak sosial dari kekeringan tidak selalu tampak dalam bentuk konflik terbuka, tetapi hadir dalam bentuk kecemasan, beban kerja tambahan, dan perubahan pola aktivitas. Warga harus mencari air lebih jauh, menunggu giliran menggunakan sumur bersama, mengatur penggunaan mesin pompa, dan membatasi pemakaian air. Perempuan dalam rumah tangga sering menanggung beban tambahan karena kebutuhan air berkaitan langsung dengan memasak, mencuci, mandi, dan kebersihan keluarga. Oleh karena itu, kekeringan perlu dibaca sebagai persoalan kesejahteraan rumah tangga, bukan hanya persoalan teknis penyediaan infrastruktur.

Temuan ketiga menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Desa Aska dipengaruhi oleh faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat internal yang paling menonjol adalah rendahnya komunikasi atau partisipasi sebagian masyarakat dalam melaporkan permasalahan kepada pemerintah desa. Pemerintah desa menyatakan sering kekurangan data karena warga tidak selalu menyampaikan kondisi yang dialami. Akibatnya, pendataan dampak dan penentuan prioritas bantuan menjadi kurang akurat. Dari sisi masyarakat, sebagian warga merasa informasi pemerintah desa belum sampai secara merata. Perbedaan persepsi ini menunjukkan adanya miskomunikasi dua arah yang perlu diperbaiki melalui mekanisme pelaporan dusun, forum warga, dan sistem data yang lebih terbuka.

Faktor penghambat internal lainnya adalah kelembagaan pengelola fasilitas air yang belum kuat. Fasilitas seperti PAMSIMAS dan SPAM memerlukan pengurus, biaya operasional, pemeliharaan mesin, pengaturan iuran, dan pengawasan penggunaan air. Ketika salah satu unsur ini tidak berjalan, fasilitas mudah mengalami disfungsi. Dalam kasus Desa Aska, hilangnya mesin pompa dan lemahnya tindak lanjut menjadi contoh bahwa pengelolaan fasilitas air perlu dilengkapi prosedur tanggung jawab, inventarisasi aset, dan pengawasan bersama. Penguatan kelembagaan menjadi kunci agar fasilitas tidak hanya dibangun, tetapi juga hidup dan digunakan secara berkelanjutan.

Faktor penghambat eksternal mencakup keterbatasan anggaran desa, kondisi sumber daya alam, dan belum optimalnya respons pemerintah daerah terhadap beberapa usulan fasilitas. Beberapa wilayah Desa Aska memiliki kondisi tanah dan sumber air yang tidak stabil, sehingga sumur bor tidak selalu berhasil menghasilkan air. Kondisi topografi dan geologi lokal membuat penyediaan air membutuhkan kajian teknis, bukan sekadar penggalian. Keterbatasan anggaran juga menghambat pemerataan sumur embung, sumur bor, dan alat pompa. Dalam situasi seperti ini, kolaborasi desa dengan pemerintah kabupaten, dinas teknis, BPBD, dan pihak ketiga menjadi kebutuhan mendesak.

Table 5. Faktor penghambat dan pendukung strategi penanggulangan kekeringan

Kategori	Faktor	Penjelasan
Penghambat internal	Komunikasi warga-pemerintah desa belum optimal	Sebagian warga tidak melapor, sementara sebagian warga merasa informasi belum merata.
Penghambat internal	Kelembagaan pengelola fasilitas air lemah	PAMSIMAS dan SPAM membutuhkan pengurus, iuran, pemeliharaan, dan pengawasan aset.
Penghambat eksternal	Anggaran dan sumber air terbatas	Pembangunan sumur bor/embung memerlukan dukungan teknis dan biaya yang tidak kecil.
Pendukung internal	Kemandirian dan solidaritas masyarakat	Warga membuat sumur galian, berbagi air, dan menyiapkan pakan ternak secara mandiri.
Pendukung eksternal	Peringatan dini dan bantuan pemerintah daerah	Informasi dari BPBD/kabupaten membantu desa melakukan sosialisasi sebelum puncak kemarau.

Sumber: Hasil analisis data lapangan, diolah peneliti (2026).

Di sisi lain, faktor pendukung internal yang kuat adalah kemandirian masyarakat. Banyak warga membangun sumur galian di rumah, berbagi sumber air dengan tetangga, menyimpan jerami untuk pakan ternak, dan mengatur penggunaan air secara mandiri. Kemandirian ini bertumpu pada nilai lokal seperti saling membantu, saling mengingatkan, dan menjaga hubungan antarwarga. Azzahrah et al. (2023) menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat berorientasi pada kemandirian melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki; praktik masyarakat Desa Aska menunjukkan bahwa pemberdayaan telah hidup dalam bentuk tindakan sehari-hari, meskipun masih perlu difasilitasi agar lebih tertata.

Faktor pendukung eksternal adalah adanya peringatan dini dari pemerintah kabupaten atau BPBD yang diteruskan pemerintah desa kepada masyarakat. Koordinasi ini membantu desa menyiapkan sosialisasi sebelum puncak kemarau. Dukungan lain tampak dalam bantuan pangan dan peluang kerja sama teknis terkait rencana sumur bor atau embung. Namun, dukungan eksternal perlu diperkuat agar tidak hanya berupa informasi dan bantuan sesaat, tetapi juga pendampingan teknis dalam pemetaan sumber air, perencanaan anggaran, dan pelatihan pengelola fasilitas air.

Analisis faktor penghambat dan pendukung memperlihatkan bahwa strategi penanggulangan kekeringan membutuhkan tata kelola kolaboratif. Pemerintah desa tidak dapat bekerja sendiri karena memerlukan partisipasi warga dan dukungan teknis pemerintah daerah. Masyarakat juga tidak dapat sepenuhnya dibiarkan mencari solusi sendiri karena keterbatasan sumber air dan biaya dapat menimbulkan ketimpangan. Oleh sebab itu, pendekatan yang paling tepat adalah menggabungkan kapasitas pemerintah desa, kemandirian masyarakat, dan dukungan pemerintah daerah dalam satu rencana penanggulangan kekeringan berbasis data.

Secara teoretis, temuan penelitian memperkuat konsep bahwa penanggulangan bencana harus dipahami sebagai siklus, bukan tindakan tunggal. Kesiapsiagaan tanpa pemeliharaan fasilitas akan menghasilkan infrastruktur yang tidak berfungsi saat dibutuhkan. Tanggap darurat tanpa data akan menghasilkan bantuan yang tidak merata. Pemulihan tanpa evaluasi akan membuat desa mengulang masalah yang sama pada musim kemarau berikutnya. Oleh karena itu, strategi Pemerintah Desa Aska perlu diarahkan pada integrasi ketiga fase: prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Desa Aska memiliki pola yang mirip dengan wilayah lain dalam hal kebutuhan suplai air dan sosialisasi, sebagaimana dibahas Wiharja (2023). Namun, Desa Aska memiliki karakter khusus berupa kombinasi antara fasilitas air yang tersedia tetapi tidak optimal, masyarakat yang relatif mandiri, serta ketergantungan ekonomi yang kuat pada pertanian. Penelitian Latif et al. (2020) tentang potensi air tanah melalui geolistrik memberi pelajaran bahwa solusi teknis seperti sumur bor perlu didahului kajian sumber air agar tidak gagal. Sementara itu, penelitian Fatah et al. (2023) menekankan pentingnya pendampingan; dalam konteks Desa Aska, pendampingan dibutuhkan untuk menguatkan kelembagaan pengelola air dan komunikasi warga.

Implikasi praktis penelitian ini adalah perlunya Pemerintah Desa Aska memasukkan penanganan kekeringan sebagai program prioritas dalam dokumen perencanaan desa. Program tersebut dapat mencakup pemetaan dusun rawan kekeringan, inventarisasi fasilitas air, jadwal pemeliharaan pompa, pembentukan tim siaga air desa, prosedur distribusi air darurat, dan mekanisme pelaporan warga terdampak. Program juga perlu memuat target terukur, misalnya jumlah sumur embung yang diperbaiki, jumlah pengelola yang dilatih, dan jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air alternatif.

Implikasi sosialnya adalah perlunya memperkuat komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa dapat menyediakan kanal pelaporan sederhana melalui kepala dusun, RT/RW, grup komunikasi warga, atau buku laporan kekeringan di kantor desa. Masyarakat perlu didorong untuk menyampaikan kondisi sumber air, kebutuhan mendesak, dan kerusakan fasilitas. Di sisi lain, pemerintah desa perlu menyampaikan tindak lanjut secara transparan agar warga mengetahui apakah laporan sudah diterima, sedang diproses, atau memerlukan dukungan pemerintah daerah. Komunikasi semacam ini akan mengurangi miskomunikasi dan meningkatkan kepercayaan.

Implikasi ekonomi dan lingkungan mengarah pada kebutuhan konservasi air. Sumur bor dan embung memang penting, tetapi harus diimbangi dengan perlindungan daerah resapan, penghijauan, pengelolaan air hujan, dan efisiensi penggunaan air pertanian. Desa dapat mengembangkan edukasi hemat air, penjadwalan irigasi sederhana, pemanfaatan tampungan air hujan, dan pemilihan tanaman yang lebih tahan kering pada musim tertentu. Strategi ini sejalan dengan gagasan mitigasi nonstruktural yang menekankan perubahan perilaku dan penguatan kapasitas masyarakat (Irawan, 2022).

Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan lokasi yang hanya berfokus pada Desa Aska dan data yang diperoleh melalui pendekatan kualitatif. Temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke seluruh desa, tetapi memberikan pemahaman kontekstual yang dapat dibandingkan dengan desa lain. Penelitian lanjutan dapat menggabungkan data hidrologis, peta sumber air, pengukuran kebutuhan air rumah tangga dan pertanian, serta analisis biaya-manfaat pembangunan fasilitas air. Dengan demikian, strategi desa dapat disusun lebih berbasis bukti dan lebih mudah diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah daerah.

Penguatan Strategi Berbasis Perencanaan Desa

Berdasarkan temuan penelitian, strategi Pemerintah Desa Aska perlu dinaikkan dari respons situasional menjadi kebijakan desa yang tersusun dalam dokumen perencanaan. Selama ini beberapa langkah sudah dilakukan, seperti sosialisasi, penyediaan fasilitas, dan bantuan pangan, tetapi keberlanjutannya masih bergantung pada kondisi darurat. Agar lebih kuat, penanganan kekeringan perlu masuk ke Rencana Kerja Pemerintah Desa dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Integrasi ini penting karena kekeringan berulang setiap musim kemarau, sehingga tidak tepat jika selalu diperlakukan sebagai kejadian mendadak. Dengan memasukkannya ke

dalam perencanaan, desa dapat menetapkan prioritas anggaran, jadwal pemeliharaan fasilitas, daftar dusun rawan, dan indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi setiap tahun.

Rencana penanganan kekeringan juga perlu dibuat berbasis data. Data yang dibutuhkan tidak hanya jumlah penduduk dan jumlah penerima bantuan, tetapi juga lokasi sumur yang masih aktif, kedalaman sumber air, rumah tangga yang tidak memiliki sumur, lokasi lahan pertanian yang paling rawan, jumlah ternak, dan jarak warga terhadap sumber air alternatif. Data semacam ini akan membantu pemerintah desa menentukan keputusan yang lebih tepat, misalnya dusun mana yang diprioritaskan untuk embung, lokasi mana yang memerlukan sumur bor, dan kelompok masyarakat mana yang harus memperoleh bantuan air lebih awal. Tanpa data, bantuan sering bergantung pada laporan lisan yang tidak selalu merata.

Pemerintah desa dapat menyusun peta sederhana kerentanan kekeringan. Peta tersebut tidak harus rumit, tetapi cukup menampilkan dusun, titik sumber air, fasilitas yang berfungsi, fasilitas yang rusak, daerah persawahan, dan wilayah yang paling sering membeli air. Peta kerentanan akan memudahkan musyawarah desa karena warga dapat melihat bukti visual mengenai lokasi prioritas. Selain itu, peta tersebut dapat digunakan saat mengajukan dukungan ke pemerintah kabupaten atau dinas teknis. Usulan yang dilengkapi data dan peta biasanya lebih kuat karena menunjukkan bahwa kebutuhan desa telah dianalisis, bukan hanya disampaikan secara umum.

Aspek lain yang perlu diperkuat adalah pemeliharaan fasilitas. PAMSIMAS, SPAM, sumur bor, dan sumur embung harus memiliki buku inventaris, jadwal pemeriksaan, penanggung jawab, serta mekanisme pelaporan kerusakan. Jika mesin pompa hilang atau rusak, laporan harus segera dibuat agar tidak menunggu musim kemarau berikutnya. Pemerintah desa bersama pengelola dapat membuat standar sederhana tentang iuran, biaya listrik, biaya perbaikan, dan kewajiban pengguna. Transparansi biaya penting agar masyarakat memahami bahwa fasilitas air membutuhkan biaya operasional dan tidak dapat berjalan hanya dengan bantuan awal.

Penguatan kelembagaan pengelola air dapat dilakukan melalui pelatihan dan pembagian tugas yang jelas. Pengurus fasilitas air perlu memahami cara menjaga pompa, mengatur jadwal penggunaan, mencatat iuran, menyampaikan laporan ke desa, dan menyelesaikan keluhan warga. Kepala dusun dapat menjadi penghubung antara pengelola dan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa juga dapat dilibatkan sebagai unsur pengawasan agar pengelolaan tidak menimbulkan kecurigaan. Dengan pembagian tugas yang jelas, fasilitas air menjadi aset bersama yang dipelihara secara kolektif, bukan hanya bangunan yang dibiarkan setelah proyek selesai.

Dalam konteks tanggap darurat, Desa Aska memerlukan prosedur distribusi air yang lebih terencana. Prosedur tersebut dapat berisi kriteria rumah tangga prioritas, cara meminta bantuan air, jadwal pemakaian pompa, dan jalur koordinasi antara kepala dusun, perangkat desa, dan warga. Rumah tangga lanjut usia, keluarga dengan balita, warga yang tidak memiliki sumur, serta petani yang lahannya paling terdampak dapat dimasukkan sebagai kelompok prioritas. Prosedur ini akan mengurangi kecemburuan sosial karena warga mengetahui alasan sebuah rumah tangga atau dusun mendapat bantuan lebih dulu.

Strategi pengurangan risiko juga perlu memperhatikan sektor pertanian. Karena mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, kekeringan harus ditangani sebagai ancaman terhadap ekonomi desa. Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan penyuluh pertanian untuk menyampaikan informasi musim tanam, pilihan bibit yang lebih tahan kering, pengendalian hama saat cuaca panas, dan penggunaan air yang lebih efisien. Sumur embung dapat diprioritaskan pada lahan yang menjadi

sumber penghidupan banyak keluarga. Selain itu, desa dapat mendorong diversifikasi tanaman agar pendapatan warga tidak terlalu bergantung pada tanaman yang sangat rentan terhadap kekeringan.

Sektor peternakan juga membutuhkan perhatian khusus. Pengalaman masyarakat menyimpan jerami sebagai pakan cadangan dapat dikembangkan menjadi program desa berupa lumbung pakan sederhana. Pada akhir panen padi, jerami dapat dikumpulkan, dikeringkan, dan disimpan oleh kelompok peternak untuk menghadapi musim kemarau. Pemerintah desa dapat memfasilitasi lokasi penyimpanan dan mendorong kelompok peternak membuat jadwal pengawasan ternak. Dengan demikian, dampak kekeringan terhadap ternak tidak hanya ditangani setelah sapi kurus, tetapi dicegah melalui persediaan pakan yang disiapkan sejak awal.

Nilai lokal masyarakat Desa Aska merupakan modal sosial yang penting. Praktik berbagi sumur, saling membantu mencari sumber air, dan kesediaan warga menggunakan satu sumber bersama menunjukkan adanya solidaritas. Namun, solidaritas perlu diatur agar tidak berubah menjadi konflik. Pemerintah desa dapat memfasilitasi kesepakatan penggunaan sumur bersama, misalnya jam pemakaian, batas volume, kewajiban mematikan pompa, dan cara menyelesaikan perselisihan. Kesepakatan yang dibuat bersama akan lebih mudah dipatuhi karena lahir dari musyawarah, bukan semata-mata perintah pemerintah desa.

Komunikasi risiko perlu dilakukan secara lebih rutin. Sosialisasi tidak hanya dilakukan sekali menjelang puncak kemarau, tetapi dapat dibagi ke dalam beberapa tahap: peringatan awal, pemeriksaan fasilitas, penghematan air, pengaturan sumber air bersama, dan evaluasi setelah musim kemarau. Media penyampaian dapat memanfaatkan masjid, pertemuan dusun, papan informasi desa, grup percakapan warga, dan pengumuman kepala dusun. Pesan yang disampaikan harus praktis, misalnya cara menyimpan air, cara menjaga kebersihan sumur, tindakan saat pompa rusak, dan nomor kontak perangkat desa yang dapat dihubungi.

Pemerintah desa juga perlu memperkuat hubungan dengan pemerintah kabupaten. Usulan sumur bor atau embung sebaiknya disertai dokumen pendukung berupa data kebutuhan air, dokumentasi kerusakan fasilitas, foto lahan terdampak, dan daftar keluarga terdampak. Koordinasi tidak hanya dilakukan saat bencana, tetapi juga pada tahap perencanaan teknis. Dinas yang membidangi pekerjaan umum, pertanian, lingkungan hidup, dan BPBD dapat dilibatkan sesuai kewenangan masing-masing. Kolaborasi lintas sektor akan mengurangi risiko pembangunan fasilitas yang tidak sesuai kondisi sumber air.

Dalam jangka panjang, Desa Aska dapat mengembangkan konsep desa tangguh kekeringan. Konsep ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama yang memahami risiko, memiliki sistem peringatan, menjaga fasilitas, dan mampu pulih setelah bencana. Desa tangguh kekeringan tidak berarti desa bebas dari kemarau, tetapi desa yang mampu mengurangi dampak kemarau terhadap air, pangan, ternak, dan ekonomi keluarga. Untuk mencapai hal itu, pemerintah desa perlu menggabungkan pembangunan fisik, edukasi warga, penguatan kelembagaan, dan konservasi sumber daya alam.

Rekomendasi utama artikel ini adalah pembentukan Tim Siaga Air Desa yang beranggotakan perangkat desa, kepala dusun, pengelola fasilitas air, kelompok tani, tokoh masyarakat, dan perwakilan perempuan. Tim ini dapat bertugas memantau sumber air, menyampaikan peringatan dini, mengelola data terdampak, mengoordinasikan pompa, dan membuat laporan pascakemarau. Keterlibatan perempuan penting karena kebutuhan air rumah tangga sangat dekat dengan peran domestik yang sering dijalankan perempuan. Dengan struktur yang lebih inklusif, informasi tentang kebutuhan air dapat lebih lengkap dan respons desa menjadi lebih adil.

Selain pembentukan tim, desa dapat membuat agenda evaluasi tahunan setelah musim kemarau. Evaluasi dilakukan untuk menilai fasilitas mana yang berfungsi, kegiatan mana yang membantu, keluhan apa yang muncul, dan rencana apa yang harus diperbaiki. Hasil evaluasi kemudian dibawa ke musyawarah desa sebagai dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. Dengan cara ini, siklus penanggulangan bencana benar-benar berjalan: pengalaman pascabencana menjadi masukan untuk kesiapsiagaan sebelum bencana berikutnya. Inilah inti manajemen kekeringan berbasis desa yang berkelanjutan.

Dari seluruh uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa persoalan utama Desa Aska bukan hanya kurangnya air, tetapi juga perlunya sistem yang mampu mengelola keterbatasan air secara adil dan berkelanjutan. Pemerintah desa sudah memiliki modal awal berupa pengalaman, fasilitas, jaringan dusun, dan masyarakat yang mandiri. Tugas berikutnya adalah mengubah modal tersebut menjadi kebijakan desa yang terukur, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika hal ini dilakukan, kekeringan pada musim kemarau berikutnya tidak lagi hanya dihadapi dengan kepanikan dan pembelian air, melainkan dengan kesiapan kolektif yang lebih matang.

Agenda Operasional untuk Penguatan Siklus Bencana

Agenda pertama adalah membangun sistem informasi kekeringan tingkat desa. Sistem ini dapat dimulai dari format sederhana berupa daftar sumber air, status ketersediaan air, dan laporan mingguan dari kepala dusun selama musim kemarau. Setiap dusun dapat melaporkan apakah sumur warga masih berfungsi, apakah ada rumah tangga yang membeli air, apakah lahan pertanian mulai mengering, dan apakah ternak kekurangan pakan. Data mingguan tersebut kemudian direkap di kantor desa. Dengan sistem sederhana ini, pemerintah desa tidak menunggu laporan terlambat, tetapi memiliki pemantauan yang berjalan terus selama periode risiko.

Agenda kedua adalah memperkuat musyawarah berbasis bukti. Ketika pemerintah desa mengundang masyarakat untuk membahas kekeringan, pembahasan perlu didukung data yang sudah dikumpulkan. Misalnya, pemerintah desa dapat menunjukkan jumlah sumur yang kering, jumlah keluarga yang membeli air, dan lokasi fasilitas yang rusak. Musyawarah berbasis bukti akan mengurangi perdebatan yang hanya didasarkan pada persepsi. Warga dapat melihat alasan suatu program diprioritaskan. Pada saat yang sama, warga dapat mengoreksi data jika ada keluarga terdampak yang belum tercatat.

Agenda ketiga adalah menyusun standar minimum layanan air saat darurat. Standar ini dapat mengatur berapa liter air minimal yang harus diupayakan untuk kebutuhan dasar rumah tangga, siapa yang menjadi prioritas, dan bagaimana mekanisme distribusi jika air bantuan datang dari luar desa. Standar tidak harus rumit, tetapi membantu pemerintah desa mengambil keputusan cepat dan adil. Tanpa standar, bantuan air sering dipersepsikan tidak merata karena masyarakat tidak memahami dasar pembagian. Standar layanan darurat juga akan membantu desa berkoordinasi dengan BPBD atau PDAM ketika meminta dukungan suplai air.

Agenda keempat adalah membangun budaya pemeliharaan. Banyak program infrastruktur desa gagal bukan karena perencanaannya buruk, tetapi karena pemeliharaannya tidak jelas. Oleh karena itu, setiap fasilitas air perlu memiliki dokumen kecil yang memuat tahun pembangunan, sumber pendanaan, kapasitas, nama pengelola, kondisi terakhir, dan kebutuhan perbaikan. Dokumen tersebut dapat ditempel di kantor desa dan diperbarui setiap enam bulan. Budaya pemeliharaan akan membuat fasilitas menjadi aset produktif, bukan sekadar bukti pembangunan fisik.

Agenda kelima adalah memperkuat edukasi rumah tangga. Warga perlu memperoleh pengetahuan praktis tentang cara menyimpan air, menjaga kebersihan wadah air, menghemat penggunaan air, dan membedakan air untuk konsumsi dengan air untuk mencuci atau menyiram tanaman. Edukasi ini tampak sederhana, tetapi berpengaruh besar saat krisis. Ketika air langka, kesalahan pengelolaan air dapat menimbulkan masalah kesehatan atau mempercepat habisnya persediaan. Edukasi rumah tangga dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan posyandu, pengajian, pertemuan kelompok tani, atau rapat dusun.

Agenda keenam adalah mengembangkan kerja sama antardusun. Tidak semua dusun memiliki kondisi sumber air yang sama. Ada dusun yang sumber airnya lebih bertahan, sedangkan dusun lain lebih cepat kering. Perbedaan ini dapat dikelola melalui kesepakatan antardusun tentang penggunaan sumber air tertentu, jalur distribusi, dan kontribusi biaya operasional. Kerja sama antardusun akan memperkuat rasa kebersamaan sebagai satu desa. Pemerintah desa berperan sebagai mediator agar sumber air tidak diperebutkan, melainkan dikelola sebagai sumber daya bersama yang digunakan secara tertib.

Agenda ketujuh adalah memperhatikan kelompok rentan. Kekeringan tidak dirasakan sama oleh semua warga. Keluarga miskin, lansia, balita, perempuan kepala keluarga, dan warga yang rumahnya jauh dari sumber air biasanya menanggung beban lebih berat. Oleh karena itu, data penerima bantuan dan distribusi air darurat perlu memberi perhatian khusus kepada kelompok tersebut. Prinsip keadilan sosial dalam pelayanan publik menuntut pemerintah desa tidak hanya membagi bantuan secara rata, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kemampuan setiap rumah tangga untuk memperoleh air secara mandiri.

Agenda kedelapan adalah menghubungkan mitigasi kekeringan dengan pembangunan ekonomi desa. Ketersediaan air mendukung pertanian, peternakan, kebersihan, dan kesehatan. Jika desa mampu mengelola air dengan baik, kerugian gagal panen dapat ditekan dan biaya rumah tangga dapat berkurang. Oleh karena itu, investasi pada embung, sumur, pompa, konservasi lahan, dan kelembagaan air harus dilihat sebagai investasi ekonomi desa. Pengeluaran desa untuk air bukan sekadar biaya, tetapi upaya menjaga produktivitas masyarakat yang menjadi dasar pendapatan desa secara luas.

Dengan agenda operasional tersebut, strategi Pemerintah Desa Aska dapat bergerak dari pendekatan reaktif menuju pendekatan preventif dan adaptif. Pendekatan reaktif hanya bekerja saat krisis terjadi, sedangkan pendekatan preventif dan adaptif menyiapkan masyarakat sebelum krisis, mengurangi risiko saat krisis, dan memperbaiki sistem setelah krisis. Perubahan pendekatan ini penting karena kekeringan kemungkinan akan terus berulang seiring perubahan iklim dan dinamika musim. Desa yang belajar dari pengalaman 2023 akan memiliki peluang lebih besar untuk mengurangi kerugian pada musim kemarau berikutnya.

Penguatan strategi juga perlu mempertimbangkan aspek akuntabilitas. Setiap bantuan air, bantuan pangan, atau rencana pembangunan fasilitas sebaiknya diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Informasi dapat mencakup sumber bantuan, jumlah penerima, kriteria penerima, dan rencana tindak lanjut. Transparansi ini penting karena bencana sering menciptakan situasi sensitif, terutama ketika kebutuhan warga tinggi sementara sumber daya terbatas. Dengan informasi terbuka, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dapat meningkat dan ruang miskomunikasi dapat dipersempit.

Aspek akuntabilitas juga berkaitan dengan evaluasi fasilitas yang sudah ada. PAMSIMAS, SPAM, sumur embung, dan sumur bor perlu dinilai berdasarkan empat pertanyaan: apakah masih berfungsi,

siapa yang bertanggung jawab, berapa biaya operasionalnya, dan apa kendala utamanya. Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat menjadi dasar keputusan apakah fasilitas perlu diperbaiki, dialihkan pengelolaannya, ditambah kapasitasnya, atau diganti dengan solusi lain. Evaluasi semacam ini membuat desa tidak terus membangun fasilitas baru tanpa menyelesaikan masalah fasilitas lama.

Keterlibatan kelompok tani perlu diperluas karena mereka merupakan pihak yang paling merasakan dampak kekeringan pada sektor produksi. Kelompok tani dapat membantu pemerintah desa memantau kondisi lahan, menyusun jadwal penggunaan air embung, serta menyebarkan informasi tentang pola tanam. Selain itu, kelompok tani dapat menjadi mitra dalam program konservasi lahan, pembuatan saluran kecil, dan pengaturan penggunaan pompa. Keterlibatan kelompok tani akan membuat strategi desa lebih dekat dengan kebutuhan lapangan.

Keterlibatan generasi muda juga dapat menjadi kekuatan baru. Pemuda desa dapat membantu pendataan digital, dokumentasi fasilitas, penyebaran informasi peringatan dini, dan pelaporan cepat melalui media komunikasi. Peran ini penting karena sebagian perangkat desa mungkin memiliki keterbatasan waktu untuk memantau seluruh wilayah. Dengan melibatkan pemuda, desa memperoleh dukungan teknis sekaligus membangun kesadaran kebencanaan pada generasi berikutnya.

Pada akhirnya, strategi penanggulangan kekeringan harus dipahami sebagai proses belajar bersama. Pemerintah desa belajar memperbaiki perencanaan, masyarakat belajar menyampaikan masalah dan menjaga fasilitas, sedangkan pemerintah daerah belajar memberi dukungan yang sesuai kebutuhan lokal. Proses belajar ini akan membuat Desa Aska lebih siap menghadapi ketidakpastian iklim. Kesiapan tersebut bukan hanya ditandai oleh tersedianya air, tetapi juga oleh adanya kelembagaan, data, solidaritas, dan keputusan kolektif yang mampu bekerja ketika kemarau datang.

Dalam pelaksanaan sehari-hari, kepala dusun dapat menjadi simpul koordinasi paling penting. Kepala dusun memahami lokasi rumah warga, sumber air, serta keluarga yang paling sering kesulitan. Karena itu, laporan kepala dusun perlu dibuat rutin, bukan hanya ketika diminta oleh kantor desa. Laporan singkat setiap pekan pada musim kemarau sudah cukup untuk memberi gambaran perubahan kondisi air.

Peran RT dan tokoh masyarakat juga tidak dapat diabaikan. Mereka dapat membantu memastikan bahwa informasi peringatan dini sampai ke rumah-rumah yang jauh dari pusat dusun. Dalam banyak kasus, informasi yang diumumkan di masjid atau kantor desa belum tentu diterima semua warga. Oleh sebab itu, penyampaian berlapis melalui tokoh lokal akan memperbesar jangkauan informasi.

Pada sisi pembiayaan, desa dapat menyusun skema bertahap. Tahun pertama difokuskan pada pendataan dan perbaikan fasilitas yang rusak. Tahun kedua difokuskan pada penambahan embung atau sumur di lokasi prioritas. Tahun ketiga difokuskan pada konservasi sumber air dan penguatan kelembagaan. Skema bertahap membuat beban anggaran lebih realistis dan mudah dievaluasi.

Pemerintah desa juga dapat membuka peluang gotong royong yang terarah. Gotong royong tidak harus berarti masyarakat menanggung seluruh biaya, tetapi dapat berupa pembersihan embung, perawatan saluran air kecil, penjagaan aset pompa, atau pendampingan warga rentan saat mengambil air. Gotong royong yang terorganisasi dapat mempercepat respons tanpa menggantikan tanggung jawab pemerintah.

Kualitas air perlu menjadi perhatian berikutnya. Ketika masyarakat mengambil air dari sungai, sumur jauh, atau tampungan bersama, risiko kesehatan dapat meningkat. Karena itu, edukasi tentang perebusan air, kebersihan wadah, dan pemisahan air konsumsi dengan air nonkonsumsi perlu

disampaikan. Ketersediaan air harus berjalan bersama keamanan air agar krisis kekeringan tidak berubah menjadi masalah kesehatan.

Pengalaman Desa Aska menunjukkan bahwa kekeringan tidak berdiri sendiri. Ia berhubungan dengan pertanian, peternakan, ekonomi rumah tangga, kesehatan, keamanan, dan hubungan sosial. Oleh karena itu, strategi yang terlalu sempit akan sulit berhasil. Pemerintah desa perlu melihat kekeringan sebagai isu lintas bidang yang memerlukan koordinasi lintas perangkat dan lembaga masyarakat.

Pada tingkat akademik, temuan ini memperlihatkan bahwa studi pemerintahan desa perlu lebih banyak mengkaji kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Desa bukan hanya objek kebijakan dari atas, tetapi ruang tempat kebijakan diuji langsung dalam kehidupan warga. Ketika desa memiliki kapasitas adaptif, program pemerintah daerah dan nasional akan lebih mudah diterima serta dimanfaatkan oleh masyarakat.

Relevansi artikel ini juga terletak pada upaya menghubungkan teori siklus penanggulangan bencana dengan praktik pemerintahan desa. Siklus prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana menjadi lebih bermakna ketika diterjemahkan ke dalam tindakan konkret: data, peringatan dini, fasilitas air, distribusi, bantuan pangan, evaluasi, dan perbaikan program. Dengan terjemahan semacam ini, teori tidak berhenti sebagai konsep, tetapi menjadi alat membaca dan memperbaiki tindakan pemerintahan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi Pemerintah Desa Aska dalam menghadapi kekeringan telah mencakup tiga fase siklus penanggulangan bencana, yaitu fase prabencana melalui penyediaan PAMSIMAS, SPAM, sumur embung, dan sosialisasi peringatan dini; fase tanggap darurat melalui pencarian sumber air dan penyediaan pompa untuk membantu suplai air masyarakat; serta fase pascabencana melalui bantuan pangan, rencana sumur bor, penambahan embung, dan penguatan pengelola fasilitas air. Dampak kekeringan dirasakan pada pertanian berupa gagal panen dan kematian tanaman, pada sumber air berupa mengeringnya sumur dan sungai kecil, pada ekonomi rumah tangga berupa meningkatnya biaya pembelian air, pada tanah berupa retak dan menurunnya kelembapan, serta pada peternakan berupa kekurangan pakan dan ternak menjadi kurus. Faktor penghambat utama adalah miskomunikasi pemerintah desa dan masyarakat, keterbatasan anggaran, kondisi sumber air yang tidak stabil, serta tidak optimalnya fasilitas air, sedangkan faktor pendukung utama adalah kemandirian masyarakat, solidaritas lokal, dan koordinasi peringatan dini dari pemerintah daerah. Kontribusi artikel ini terletak pada penegasan bahwa manajemen kekeringan desa harus dibangun sebagai siklus berkelanjutan berbasis data, partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan air, dan integrasi program dalam perencanaan pembangunan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH (OPTIONAL)

menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Aska, perangkat desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, dan warga yang telah memberikan informasi dan dukungan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sinjai atas dukungan akademik dalam penyusunan naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan, I. (2020). Urgensi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 127–138.
- Azzahrah, G. T., Priyanti, E., Febriantini, K., & Kurniansyah, D. (2023). Strategi lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. *Community Development Journal*, 4(2), 3763–3768.
- Fatah, A., Ulum, M., & Bowo, T. A. (2023). Peran LSM dalam penanggulangan kekeringan dan implikasinya bagi ketahanan wilayah di Kapanewon Nglipar Gunungkidul. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(1), 108–122. <https://doi.org/10.22146/jkn.78982>
- Hamid, R. S., Salju, Suharnitha, Pelandira, F., Fadillah, N., Lusi, N., & Ruddin, D. R. (2021). KKN kebencanaan: Desa tangguh bencana sebagai upaya pemulihan ekonomi dan kondisi sosial. *Martabe: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 306–313.
- Hariyanto, Putra, N. F. X. C., Aziz, P. B. S., Kurniawan, A., Saribanon, N., Setia, T. M., & Ilmi, F. (2022). Penguatan kelembagaan pengelola air bersih di Distrik Klasafet Kabupaten Sorong. *Jupemas: Jurnal Umum Pengabdian Masyarakat*, 1, 42–52.
- Haryo Praseno, R. R., & Mahendra, G. K. (2021). Peran pemerintah Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo dalam penanggulangan bencana kekeringan. *Jurnal Caraka Prabhu*, 5(1), 114–126. <https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.417>
- Heryana, A. (2018). *Informan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif*. Universitas Esa Unggul.
- Irawan, S. (2022). Forecasting curah hujan sebagai upaya mitigasi bencana kekeringan di Kabupaten Gunung Kidul tahun 2022. *Prosiding Seminar Nasional Pertanian UNS*, 6(1), 370–376.
- Latif, D. O., Utomo, H. B., Prawoto, H., Nuranto, S., Suwardo, Haryanto, I., Kurniawan, A., Himawan, L., & Ula, A. U. A. (2020). Potensi sumber air tanah menggunakan geolistrik sebagai solusi penanganan kekeringan di Desa Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat*, 3(2), 477–484.
- Minhar, D. R., & Aco, F. (2021). Mitigasi bencana dalam mengatasi kekeringan di Kalurahan Gayamharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman. *Jurnal Enersia Publika*, 5(1), 368–381.
- Neritarani, R. (2019). Identifikasi dan strategi mitigasi bencana kekeringan potensial di Kabupaten Semarang. *Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 8(1), 72–84.
- Pemerintah Kabupaten Sinjai. (2012). *Peraturan daerah Kabupaten Sinjai Nomor 36 Tahun 2012 tentang penanggulangan bencana*.
- Raco, J. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.
- Rahma, F. (2022). *Tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir di Perumahan Lembah Griya Indah Kelurahan Ragajaya* [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Sudarti, & Puspitasari, N. R. (2021). Analisis studi kasus krisis ketersediaan air musim kemarau dalam upaya menanggulangi pada masyarakat di Desa Butuh. *Journal of Research and Education Chemistry*, 3(2), 86–95. [https://doi.org/10.25299/jrec.2021.vol3\(2\).7127](https://doi.org/10.25299/jrec.2021.vol3(2).7127)
- Surmaini, E. (2016). Pemantauan dan peringatan dini kekeringan pertanian di Indonesia. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 10(1), 37–50.
- Sutrisnawati, N. K. (2018). Dampak bencana alam bagi sektor pariwisata di Bali. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 9(1), 57–66. <https://doi.org/10.22334/jihm.v9i1.144>

-
- Wiharja, S. P. (2023). *Upaya penanggulangan bencana kekeringan di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang*. ResearchGate.
- Zakiah, U., & Idrus, I. A. (2017). Strategi pengelolaan sumber daya alam Desa Ponggok. *JIP: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 84–95. <https://doi.org/10.24905/jip.2.2.2017.84-95>